

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1987..
- A.W.Widjaja, Administrasi Kepegawian, (Jakarta: Rajawali, 2006
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001
- Dharma Satyawana Salam, Manajemen Pemerintahan Indonesia, Edisi Revisi, Djambatan, Jakarta, 2004.
- Fathur Rahman, Teori Pemerintahan, UB Press, Malang, 2018
- Hanif Nurcholih, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Edisi Revisi, PT Grasindo, Jakarta, 2005
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Inu Kencana Syafie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Irawan Soejito, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990
- Ismail Nurdin, Etika Pemerintahan, Norma, Konsep dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintah, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2017.
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan kedaulatan rakyat dalam konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia, ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Daerah, Alumni, Bandung,, 2004.
- Khairul Ikhwan Damanik et. al., Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, Dan Masa Depan Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010,
- Lukman, Santoso, Hukum Pemerintahan Daerah, Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara, 2007

Oentarto Sindung Mawardi, Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta, 2004.

Pheni Chalid, Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan Dan Konflik, Kemitraan, Jakarta, Agustus 2005

Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998

Richad Batley dan Gerry Stoker, Local Government in Europe, dalam Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Nusamedia, 2009

Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2008.

Ridwan HR, , Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2004,

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 21  
H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Rajawali Press, Jakarta, 2000.

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali Pers, Depok, 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

### **Hasil Penelitian**

Aryo Akbar, *Kepindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Sistem Otonomi Daerah*, Tesis, Universitas Airlangga, Januari, 2009.

La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.–

Joko Waluyo, *Implikasi Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS Terhadap Sistem Pelayanan Publik di Kabupaten Wonogiri (Studi Sosio Legal di Desa Purworejo, Pokoh Kidul dan Wonokerto Kecamatan Wonogiri*, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Dwi Ayu Melani, *Persepsi Ibu-Ibu di Surabaya Terhadap Slogan “Dua Anak Lebih Baik” Dalam Iklan Layanan Masyarakat Program Keluarga Berencana di televisi (Studi Deskriptif Persepsi Ibu-Ibu Di Surabaya Terhadap Isi Slogan “Dua Anak Lebih Baik Dalam Iklan Layanan Masyarakat Program Keluarga Berencana Di Televisi)*, Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan Univesitas Pembangunan Nasional “Veteran” jawa Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Surabaya, 2011

### **Jurnal**

Anggun Perwita Sari, *Manajemen Kepegawaian*, Jurnal FH Universitas Sriwijaya, 11 November 2019, hlm. 5

M. Kadarisman, *Pemberdayaan Karyawan Dalam Birokrasi*, Sociae Polites Vol. X No. 28, Tahun 2009 Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Jakarta, Indonesia, hlm. 2.

Philipus M. Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, him. 90.

### **Internet**

Website <http://sumbarpost.com/akhirnya-tenaga-plkb-di-sumbar-beralih-status/> diakses pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 07.00 WIB.